



REVIEW DAN MASUKAN ATAS HASIL KE GIATAN SURVEY JALAN P/KRMS UNTUK TAHUN ANGGARAN 2023

FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI SUMATERA BARAT




KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Atas rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan laporan review dan masukan atas hasil kegiatan survey jalan PKRMS untuk tahun anggaran 2022. Pesatnya kemajuan transportasi pada saat ini menuntut kebutuhan infrastruktur jalan yang lebih memadai. Infrastruktur jalan merupakan salah satu aset publik utama dalam transportasi yang paling sering digunakan oleh publik untuk mendukung kegiatan ekonomi, bisnis, kerja, dan lain-lain. Hal ini dipertegas dalam Undang-undang Jalan No.38 Tahun 2004 tentang jalan yang menyebutkan bahwa jalan merupakan prasarana transportasi yang memegang peranan penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik dan pertahanan keamanan. Oleh karenanya, diharapkan saran dan kritik yang membangun diperlukan untuk di masa mendatang.

Semoga hasil review dan masukan atas hasil kegiatan survey jalan PKRMS kegiatan ini dapat bermanfaat sebagai masukan pada program aplikasi PKRMS dalam menentukan penanganan dan pembiayaan jalan pada tahun-tahun selanjutnya berdasarkan data input yang benar serta justifikasi data input yang akurat di Provinsi Sumatera Barat.

Penanggung Jawab Forum LLAJ Provinsi
Sumatera Barat,

An. Tim Penyusun
Sekretaris Forum LLAJ



ERA OKTAVIADY, SE

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 TUJUAN

1.2 KONDISI JALAN

1.3 KENDALA

1.4 PENANGANAN

BAB 2 : MASUKAN HASIL P/KRMS

2.1 P/KRMS

2.2 PRINSIP P/KRMS

2.3 SIKLUS PERENCANAAN P/KRMS

2.4 VERIFIKASI DATA

2.5 HASIL ANALISIS P/KRMS

2.6 MASUKAN HASIL P/KRMS

BAB 3 : KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 KESIMPULAN

3.2 SARAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. TUJUAN

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Sumatera Barat ((FLLAJ) diharapkan untuk melakukan review terhadap program *Provincial/ Kabupaten Road Management System* (P/KRMS) dengan tujuan untuk memberikan masukan pada program aplikasi P/KRMS dalam menentukan penanganan dan pembiayaan jalan pada tahun tahun selanjutnya berdasarkan data input yang benar serta justifikasi data input yang akurat, sehingga output program tersebut berupa paket pekerjaan terkait penanganan dan pembiayaan jalan dapat dilaksanakan secara lebih efektif.

Pemanfaatan anggaran daerah dalam pembiayaan pemeliharaan jalan dapat lebih sesuai dengan kondisi jalan, pembebanan lalu lintas pada jalan serta kondisi hasil inventarisasi lapangan yang terqualifikasi secara efektif.

1.2 Kondisi Jalan

Kondisi kemantapan jalan dari tahun ke tahun di Provinsi Sumatera Barat banyak mengalami peningkatan. Termasuk upaya dalam pemeliharaan dan peningkatan kelas jalan sehingga kualitas jalan.

1.3 Kendala

Adapun kendala yang dihadapi meliputi:

- a. Tuntutan masyarakat akan kebutuhan pelayanan jalan jauh lebih tinggi dari kondisi infrastruktur jalan Provinsi yang ada;
- b. Kondisi Kontur Wilayah Provinsi Sumatera Barat yang di dominasi oleh gunung daerah Perbukitan, gunung, dan laut sehingga d beberapa lokasi menjadi rawan masih mengalami longsor dan bencana alam lainnya
- c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat yang terbilang relative rendah dan terbatas sehingga dalam pemanfaatannya perlu pertimbangan yang seoptimal mungkin.

1.4 Penanganan

Rencana strategis penanganan jalan dilakukan dalam menghadapi kendala saat ini maupun kedepan, dengan merumuskan strategi penanganan jalan jangka pendek dan jangka panjang meliputi:

1. Penanganan Jangka Pendek
 - a. Pemeliharaan rutin.
 - b. Pemeliharaan berkala pada ruas jalan pada kondisi jalan sedang dan rusak ringan.
 - c. Rekonstruksi pada ruas jalan Provinsi dalam kondisi rusak berat untuk peningkatan struktur.
2. Penanganan Jangka Panjang

Pengembangan jalan menuju kemantapan kapasitas jalan yang lebih baik .

BAB II

PEMBAHASAN DAN MASUKAN

2.1 P/KRMS

Provincial/Kabupaten Road Management System (P/KRMS) dengan komposisi pendanaan terdiri dari 40% Hibah Pemerintah Australia dan 60% Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan alat bantu untuk mendukung perencanaan, pemrograman, dan penganggaran (PPP) jalan daerah. Sebagai alat bantu yang berupa software, hasil keluaran P/KRMS sangat bergantung pada data yang dimasukkan ke dalam P/KRMS. Oleh karena itu, penyediaan atau pengumpulan data yang memadai, akurat, dan tepat waktu merupakan bagian yang esensial dari pengoprasian P/KRMS. Serta sebagai dasar untuk justifikasi teknis penentuan program yang akan dilakukan di daerahnya untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan jalan secara efektif dan efisien, agar dapat meningkatkan kinerja pengelolaan dan pelayanan Pemerintah Provinsi/Kabupaten kepada masyarakat pengguna jalan.

2.2 Prinsip P/KRMS

Prinsip analisis dan pemrograman dapat didasarkan atas prinsip analisis kebutuhan pemeliharaan, penentuan prioritas pemeliharaan rutin, dan penentuan prioritas pekerjaan utama. Untuk dapat mengakomodir pekerjaan dengan anggaran yang terbatas, diperlukan adanya penentuan tingkat prioritas pemeliharaan rutin pada setiap ruas jalan. Sedangkan tingkat prioritas untuk tipe pekerjaan utama ditentukan dengan cara menghitung nilai *Triggered Priority Index* (TPI). Perhitungan nilai TPI merupakan perkalian nilai bobot dan nilai *Multi Criteria Analysis* (MCA).

2.3 Siklus Perencanaan P/KRMS

Program P/KRMS seperti program lainnya memiliki siklus perencanaan yang spesifik sesuai dengan konten dan fitur yang dikembangkan dalam program tersebut. Dalam program P/KRMS ini siklus perencanaan terdiri atas 3 bagian besar yaitu Data input program; Eksekusi program; dan Output program. Keluaran dari hasil eksekusi program perlu dilakukan verifikasi ulang sehingga keluaran program dapat sesuai dengan kondisi sesungguhnya dilapangan.

Secara lengkap siklus perencanaan di desain dalam program PKRMS digambarkan sebagai berikut :

a) Kondisi:

Perlu verifikasi secara detail dengan kondisi terkini dilapangan, sehingga perlu ada data base lapangan yang ter-update secara berkala minimal dalam rentang 1 (satu) tahun;

b) Lalulintas: perlu pengukuran lapangan dalam waktu yang cukup (minimal 7 hari) sebagai indikator beban yang harus dipikul oleh jalan;

c) Inventarisasi:

Data input yang sudah di-*collect* dalam penetapan inputing dalam program perlu dilakukan verifikasi dari tim teknis lapangan seperti dari juru ukur jalan ditiap-tiap daerah;

d) Harga satuan:

Perubahan atau perbedaan yang signifikan atas harga satuan khususnya upah (ongkos) perlu dilakukan croscheck secara lebih cermat;

e) Pelaksanaan:

Dalam menetapkan skala prioritas dalam penentuan ruas jalan yang mendapat penanganan perlu juga dimasukan unsur kebutuhan mendesak akibat adanya perubahan kebijakan misalnya kebijakan pariwisata sebagai akibat dari isu global, nasional maupun internasional didaerah.

2.4 Verifikasi Data

Verifikasi data lapangan dapat dilakukan saat pendataan data kondisi lapangan terhadap semua ruas jalan Provinsi yang ditinjau oleh tim teknis dilapangan (daerah), sehingga validasi data input dapat dipertanggungjawabkan misalnya data input kondisi jalan dan data input volume harga satuan.

2.5 Hasil Analisis P/KRMS

Hasil keluaran dari program P/KRMS dapat dijadikan sebagai informasi atau pedoman terhadap perencanaan penanganan terhadap ruas yang akan diusulkan sebagai salah satu kebutuhan terhadap program kegiatan. Dalam hal ini untuk kegiatan PHJD Provinsi Sumatera Barat, telah berada pada tahap III, sehingga untuk data yang dibutuhkan dalam masukan terhadap tahun anggaran berikutnya dilaksanakan pada ruas yang termasuk dalam

kegiatan Dana Alokasi Khusus untuk tahun 2023. Ruas tersebut adalah sebagai berikut:

a. Ruas Simp. Padang Aro – Lubuk Malako dari hasil PKRMS diperoleh sebagai berikut :

| Alokasi Dana kebutuhan Dana (Rp/Juta) | Jenis Pemeliharaan | Panjang (Km) | Keterangan |
|--|-------------------------|--------------|------------|
| 6.105.270,00 | Pemeliharaan Rutin (PR) | 20 | |
| | Rutin Kondisi (RK) | 19 | |
| | Berkala | 2.3 | |
| | Rehabilitas | 0.1 | |

b. Ruas Singkarak – Arian – Tanjung Balit dari hasil PKRMS diperoleh sebagai berikut :

| Alokasi Dana kebutuhan Dana (Rp/Juta) | Jenis Pemeliharaan | Panjang (Km) | Keterangan |
|--|-------------------------|--------------|------------|
| 7.097.326,50 | Pemeliharaan Rutin (PR) | 30.00 | |
| | Rutin Kondisi (RK) | 27.00 | |
| | Berkala | 4.00 | |
| | Rehabilitas | 0 | |

c. Ruas Guguk Cino – Sawah Lunto (Lapangan Segitiga) dari hasil PKRMS diperoleh sebagai berikut :

| Alokasi Dana kebutuhan Dana (Rp/Juta) | Jenis Pemeliharaan | Panjang (Km) | Keterangan |
|--|-------------------------|--------------|------------|
| 7.081.313,30 | Pemeliharaan Rutin (PR) | 30.6 | |
| | Rutin Kondisi (RK) | 29.10 | |
| | Berkala | 3.10 | |
| | Rehabilitas | 0 | |

d. Ruas Kantor Camat - Berkat dari hasil PKRMS diperoleh sebagai berikut :

| Alokasi Dana kebutuhan Dana (Rp/Juta) | Jenis Pemeliharaan | Panjang (Km) | Keterangan |
|--|-------------------------|--------------|------------|
| 14.168.310,45 | Pemeliharaan Rutin (PR) | 5.4 | |
| | Rutin Kondisi (RK) | 2.2 | |
| | Berkala | 0.7 | |
| | Peningkatan | 2.3 | |

e. Ruas Sicincin-Kurai Taji dari hasil PKRMS diperoleh sebagai berikut :

| Alokasi Dana kebutuhan Dana (Rp/Juta) | Jenis Pemeliharaan | Panjang (Km) | Keterangan |
|--|-------------------------|--------------|------------|
| 7.097.450,00 | Pemeliharaan Rutin (PR) | 16.4 | |
| | Rutin Kondisi (RK) | 16.4 | |
| | Berkala | 2.4 | |
| | Rehabilitas | 0 | |

f. Ruas Rao Rokan – Batas Riau dari hasil PKRMS diperoleh sebagai berikut :

| Alokasi Dana kebutuhan Dana (Rp/Juta) | Jenis Pemeliharaan | Panjang (Km) | Keterangan |
|--|-------------------------|--------------|------------|
| 9.484.081,80 | Pemeliharaan Rutin (PR) | 33.0 | |
| | Rutin Kondisi (RK) | 32.7 | |
| | Berkala | 5.4 | |
| | Rehabilitas | 0.1 | |

2.6 Masukan hasil P/KRMS

Masukan hasil keluaran dari program P/KRMS untuk tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Dalam penyusunan DED diharapkan agar dapat melibatkan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk Survey PKRMS juga menggabungkan dengan survey Blackspot dengan melibatkan FLAJ sehingga data yang diperoleh selain data lalu lintas juga memperoleh data rawan kecelakaan lalu lintas
3. Dalam pengambilan data survey PKRMS terutama pada pengambilan data lalu lintas agar dapat melibatkan tenaga ahli dari Dinas Perhubungan untuk memperkaya data yang dapat diperoleh dan menjamin keakuratan serta optimalisasi dalam pengambilan

data untuk mendapatkan Lalu lintas harian rata – rata (LHR) /Average Annual Daily Traffic (AADT) pada suatu ruas jalan baik dengan menggunakan metode TC (traffic Counting) ataupun MCO (Moving Car Observer).

4. Sebagai pertimbangan dalam prioritas ruas jalan yang akan ditangani pada tahun berikutnya terutama pekerjaan rehabilitasi jalan /overlay, agar berkoordinasi dengan dinas perhubungan terkait paket pekerjaan pemasangan fasilitas keselamatan (marka dan rambu) agar fasilitas keselamatan yang baru atau akan dipasang tidak saling tumpang tindih dengan pekerjaan rehabilitasi Jalan.
5. Agar memperhatikan variable long segmen sebagai pertimbangan penanganan ruas jalan sehingga nanti pada pelaksanaan kegiatan tidak menimbulkan permasalahan baru/kerusakan jalan pada saat operasional kendaraan material.
6. Agar nantinya dalam paket – paket pekerjaan jalan harus mempertimbangkan tonase kendaraan material dan pengangkut alat berat dengan kapasitas ruas jalan yang akan dilalui.
7. Pekerjaan peningkatan dan/atau pemeliharaan ruas jalan yang sudah dilaksanakan agar tetap dilanjutkan/dilakukan pemeliharaan sesuai perencanaan sampai masa pekerjaan konstruksi jalan yang telah direncanakan sesuai dengan perencanaan.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

1. Hasil keluaran program P/KRMS untuk ruas jalan Provinsi Sumatera Barat dapat diterima oleh Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Sumatera Barat, untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat.
2. Penanganan terhadap 6 ruas jalan sehingga jalan yang telah dikerjakan sangat mendukung akses ke beberapa tempat wisata di daerah Provinsi Sumatera Barat sehingga hal ini dapat mendukung peningkatan pariwisata dan meningkatkan manfaat yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat khususnya wilayah provinsi Sumatera Barat
3. Panjang ruas penanganan telah disesuaikan dengan biaya yang diusulkan oleh Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

3.2 Saran

1. Agar pemasangan rambu pada ruas jalan disebutkan dapat disesuaikan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas.
2. Dalam pembuatan DED setiap tahun berikutnya, Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Marga Provinsi Sumatera Barat dapat melibatkan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Sumatera Barat jika diperlukan utamanya terkait dengan kebutuhan penyandang disabilitas dan keselamatan berlalu-lintas.
3. Melakukan Koordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dalam rencana ruas jalan yang akan ditangani pada tahun berikutnya terutama pekerjaan rehabilitasi jalan /overlay agar fasilitas keselamatan yang baru atau akan dipasang tidak saling tumpang tindih dengan pekerjaan rehabilitasi Jalan.
4. Melakukan manajemen terhadap penggunaan operasional kendaraan material dan alat berat yang sesuai dengan yonase kemampuan jalan dan rute ruas jalan yang akan di lalui ke lokasi pekerjaan nantinya.

LAMPIRAN DOKUMENTASI PEMBAHASAN DAN RAPAT AKHIR PKRMS





